

**PARTISIPASI INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH,
PEMBERDAYAAN GENDER DAN *ICT DEVELOPMENT INDEX*
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2017-2021
(STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA)**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER EKONOMI ISLAM**

**OLEH :
NURUL HASANAH
NIM. 20208012037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

**PARTISIPASI INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH,
PEMBERDAYAAN GENDER DAN *ICT DEVELOPMENT INDEX*
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2017-2021
(STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA)**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER EKONOMI ISLAM**

**OLEH :
NURUL HASANAH
NIM. 20208012037**

**PEMBIMBING
DR. MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO, S.E., M.SC
NIP: 19800314 200312 1 003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1341/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PEMBERDAYAAN GENDER DAN ICT DEVELOPMENT INDEX TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2017-2021 (STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL HASANAH, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 20208012037
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 64ec5681d76ad



Penguji I

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64ec56ae2166d



Penguji II

Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64e98047e68aa



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ed75837ec21

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nurul Hasanah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di – Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Setelah Membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengeroksi serta menanyakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pemimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Hasanah

NIM : 20208012037

Judul Tesis : **Partisipasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender dan *ICT Development Index* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)**

Sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magsiter dalam Ilmu ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Pemimbing


Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc

NIP: 19800314 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 20208012037
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“PARTISIPASI INVESTASI, PEGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PEMBERDAYAAN GENDER DAN *ICT DEVELOPMENT INDEX* TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2017-2021 (STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam body note dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2023



Nurul Hasanah

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 20208012037
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Partisipasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender dan *ICT Development Index* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 7 Agustus 2023


(Nurul Hasanah)

HALAMAN MOTTO

*“Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar
maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan”*

Imam Syafi’i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sutar dan Ibu Kasiati yang tanpa henti selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan motivasi serta semangat yang selalu diberikan selama menuntut ilmu.
2. Suami Saya Fajar Nurrahman yang selalu kebersamai, mendukung dan memberikan semangat pada setiap proses belajar saya.
3. Orang tua saya di jogja Bapak Kemiran dan Ibu Bintiati.
4. Kakak saya Muhammad Ali Mukmin, Adik saya Muhammad Mashuda, Raras Oktaviana Dewi dan seluruh teman belajar yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan agar menyelesaikan pendidikan dengan baik
5. Para Dosen, Staf serta Almamater Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fītri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fā’ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā falā
Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Ī Tafsīl
Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis	u uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati الزُّحَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	ai az-zuḥailī
-------------------------------------	--------------------	------------------

Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	au ad-daulah
--------------------------------------	--------------------	-----------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur hanya bagi Allah SWT atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Partisipasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender dan ICT Development Index Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc. selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan demi terwujudnya penelitian ini.
4. Dr. H. Muhammad Yazid Afandi, M. Ag., selaku dosen pembimbing akademik saya

5. Para Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai serta staf tata usaha Program Studi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Penyusun



(Nurul Hasanah)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori.....	21
B. Kajian Pustaka.....	41
C. Hipotesis.....	45
D. Kerangka Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Populasi Dan Sampel	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Definisi Operasional Variabel.....	53

E. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian /Sampel	64
B. Analisis Statistik Deskriptif	71
C. Analisis Estimasi Regresi Data Panel	75
D. Analisis Hasil Uji Hipotesis	89
E. Pembahasan Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Keterbatasan Dan Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM Provinsi di Indonesia	3
Tabel 1. 2 Komponen Penerimaan Pemerintah Daerah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2021	9
Tabel 1. 3 Realisasi dan Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2021	11
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	71
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	76
Tabel 4. 3 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	77
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	78
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	79
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman.....	80
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi data Panel dengan Variabel Kontrol.....	80
Tabel 4. 8 Hasil Uji <i>Chi Square</i>	83
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hausman.....	84
Tabel 4. 10 Perbandingan Hasil Regresi Data Panel dengan Variabel Kontrol....	84
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel 4. 12 Hasil Heteroskedastisitas	88
Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi	88
Tabel 4. 14 Hasil Model Terpilih <i>Fixed Effect Model</i>	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2021	2
Grafik 1. 2 Realisasi PMA di Indonesia Tahun 2020-2022 (Data Quartal).....	6
Grafik 1. 3 Realisasi PMDN di Indonesia tahun 2020-2022 (Data Quartal)	7
Grafik 1. 4 Keterlibatan Perempuan Indonesia di Parlemen.....	12
Grafik 1. 5 Perkembangan TIK Indonesia 2017-2021	15
Grafik 4. 1 Pergerakan Nilai Indeks Pembangunan Manusia	64
Grafik 4. 2 Realisasi PMA yang masuk ke Indonesia tahun 2017-2021	66
Grafik 4. 3 Realisasi Nilai PMDN di Indonesia (34 Provinsi) tahun 2017-2021 .	67
Grafik 4. 4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia.....	68
Grafik 4. 5 Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia tahun 2017-2015	69
Grafik 4. 6 Indeks Pembangunan TIK di Indonesia tahun 2017-2021	70
Grafik 4. 7 Uji Normalitas	86
Grafik 4. 8 Penyerapan Tenaga Kerja dari PMA di Indonesia Tahun 2017-2021	95
Grafik 4. 9 Penyerapan Tenaga Kerja dari PMDN di Indonesia Tahun 2017- 2021.....	99
Grafik 4. 10 Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2017-2021	105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan merupakan langkah menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan pendekatan melalui berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesejahteraan di Indonesia melalui modal masuk (PMA dan PMDN), peran Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender, Teknologi Informasi dan Komunikasi), serta aspek sosial (Pengangguran, Kemiskinan dan Populasi). Penelitian pada 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan PMA (Penanaman Modal Asing) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan *ICT Development Index* berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Indeks Pemberdayaan Gender, persentase pengangguran terbuka dan populasi tidak berpengaruh terhadap indeks kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada periode penelitian.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia, PMA, PMDN, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender dan *ICT Development Index*



ABSTRACT

More equitable and sustainable human development is a step towards a prosperous society. To achieve this prosperity requires an approach through various aspects. This study aims to look at welfare in Indonesia through incoming capital (FDI and PMDN), the role of Regional Government Expenditures, Gender Empowerment, Information and Communication Technology), as well as social aspects (Unemployment, Poverty and Population). This research in 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021 uses the panel data regression method. The results of this study indicate that PMA (Foreign Investment) and the Percentage of Poor People (PPM) have a negative effect on people's welfare. PMDN (Domestic Investment), Regional Government Expenditures, and the ICT Development Index have a positive effect on the Human Development Index. While the variable Gender Empowerment Index, the percentage of open population and the population have no effect on the index of people's welfare in Indonesia during the study period.

Keywords: Community Welfare, Human Development Index, PMA, PMDN, Regional Government Expenditure, Gender Empowerment and ICT Development Index



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

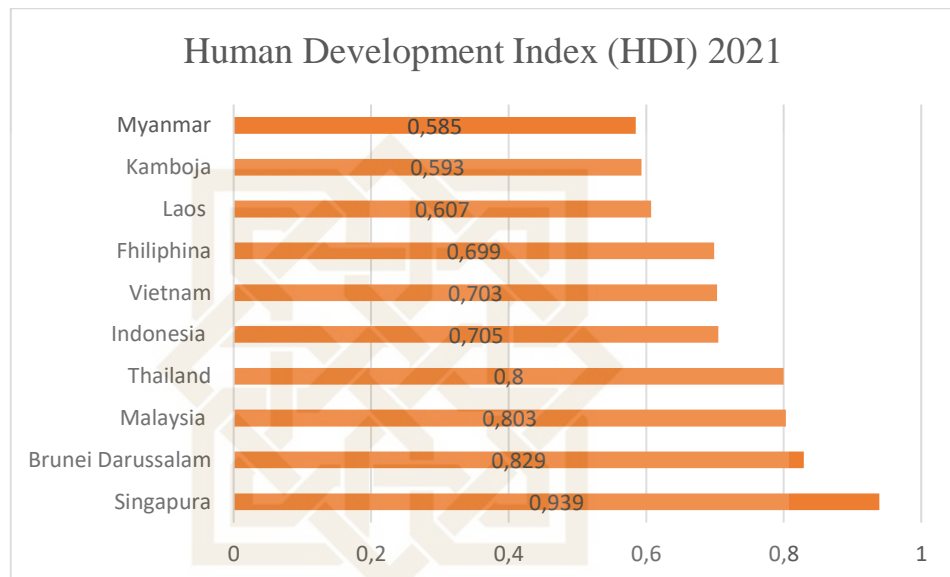
A. Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju apabila telah mapan pembangunannya dan menjangkau seluruh aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya (Nurwanti et al., 2021). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kemajuan suatu negara menurut kualitas hidup penduduknya. Menurut UNDP, (2022) *Human Development Index* (HDI) atau IPM dihadirkan untuk menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya ukuran pembangunan suatu negara. IPM juga memperhitungkan kualitas hidup warganya, seperti kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

IPM digunakan untuk menyoroti perbedaan di dalam negara, antar provinsi atau antar negara bagian dan lintas gender, etnis dan kelompok sosial ekonomi lainnya (Wijaya & Adityawarman, 2015). Sejalan dengan Angel et al., (2021), adanya IPM mempercepat pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan secara sosioekonomi. Tujuan akhir dari proses ini adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Berdasarkan Indeks IPM dunia, indonesia menempati urutan ke 113 dari 191 negara di Dunia dengan nilai IPM 0,705. Masih tertinggal jauh dari negara Malaysia yang berada pada urutan ke 62 dan Thailand yang berada pada urutan 66,

meskipun nilai IPM Indonesia termasuk kategori tinggi. Berikut data IPM di ASEAN,

Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2021



Sumber: UNDP sumber data diolah

Berdasarkan grafik 1.1, negara dengan nilai IPM tertinggi adalah Singapura dengan skor 0,939 diperoleh dari Angka harapan hidup 82,8 tahun, Ekspektasi sekolah 16,5 th, Rata-rata lama sekolah 11,9 dan nilai GNI \$ 90,919. Disusul oleh negara Brunei Darussalam dengan nilai IPM 0,829, Malaysia 0,803. Negara ASEAN dengan IPM terendah adalah Myanmar dengan nilai 0,585. Indonesia berada pada urutan ke 5 dengan nilai IPM 0,705 diperoleh dari AHH 67,6 tahun, ekspektasi lama sekolah 13,7 tahun, RLS 8,6 tahun dan GNI \$ 11,466

Ketidakmerataan IPM juga terjadi dalam lingkup regional Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata diantar daerah, berikut tabel IPM di Indonesia tahun 2021

Tabel 1. 1 IPM Provinsi di Indonesia

No	PROVINSI	IPM	No	PROVINSI	IPM
1	Aceh	72.18	18	Nusa Tenggara Barat	68.65
2	Sumatera Utara	72.00	19	Nusa Tenggara Timur	65.28
3	Sumatera Barat	72.65	20	Kalimantan Barat	67.90
4	Riau	72.94	21	Kalimantan Tengah	71.25
5	Jambi	71.63	22	Kalimantan Selatan	71.28
6	Sumatera Selatan	70.24	23	Kalimantan Timur	76.88
7	Bengkulu	71.64	24	Kalimantan Utara	71.19
8	Lampung	69.90	25	Sulawesi Utara	73.30
9	Kep. Bangka Belitung	71.69	26	Sulawesi Tengah	69.79
10	Kep. Riau	75.79	27	Sulawesi Selatan	72.24
11	Dki Jakarta	81.11	28	Sulawesi Tenggara	71.66
12	Jawa Barat	72.45	29	Gorontalo	69.00
13	Jawa Tengah	72.16	30	Sulawesi Barat	66.36
14	Di Yogyakarta	80.22	31	Maluku	69.71
15	Jawa Timur	72.14	32	Maluku Utara	68.76
16	Banten	72.72	33	Papua Barat	65.26
17	Bali	75.69	34	Papua	60.62

Berdasarkan tabel 1.1 terjadi ketidakmerataan nilai indeks pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai 81,11 disusul DI Yogyakarta dengan nilai 80,22 hal ini ditopang oleh akses kesehatan yang merata, akses pendidikan yang mudah serta akses ekonomi yang terbuka. Sedangkan Papua dan Papua Barat merupakan daerah dengan IPM terendah, hal ini disebabkan kurang memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Salah satu kebijakan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan IPM adalah percepatan wajib belajar 12 tahun karena pendidikan berperan penting sebagai sarana

utama dalam upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia. Program wajib belajar 12 tahun diselenggarakan dengan tujuan memberikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat (Ratnawati *et al.*, 2013).

Mewujudkan masyarakat yang sejahterah dimulai dengan membangun kualitas manusia. Pembangunan manusia merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi, sosial dan lingkungan dengan kekhususan yang berbeda pada setiap wilayah maupun negara (Cabello Eras *et al.*, 2022). Menurut Cili & Alkhaliq (2022) semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mencerminkan semakin baik pembangunan dan kegiatan di suatu wilayah. Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional, ketimpangan merupakan konsekuensi alamiah dari pembangunan yang bervariasi tergantung pada tingkat pembangunan. Pola perkembangan dan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang terdapat di berbagai provinsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan PDRB per kapita antar provinsi, tetapi juga terkait dengan banyak faktor, terutama perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh provinsi-provinsi tersebut (Prasasti, 2006).

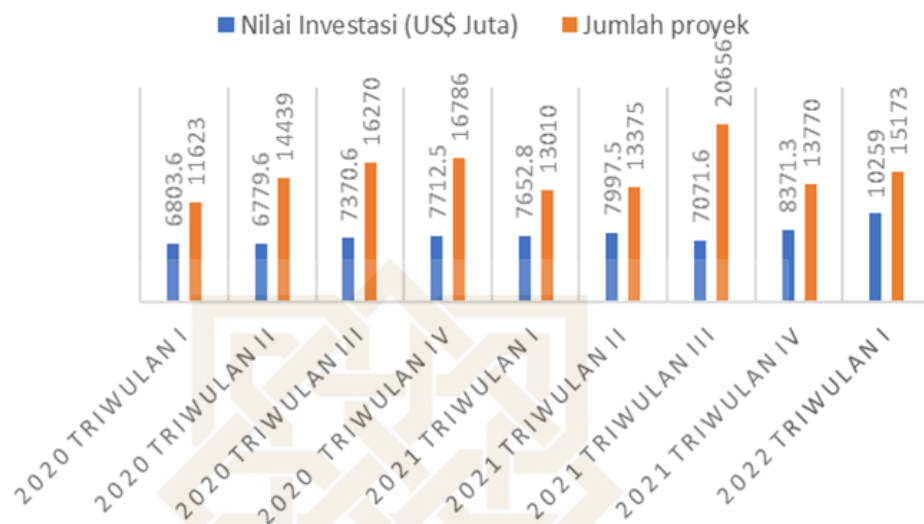
Aliran modal yang masuk ke suatu negara memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan Wang *et al.*,(2018) dalam periode 1990-2014 di Pakistan semakin tinggi pendapatan negara semakin rendah tingkat pembangunan

manusianya karena akses ke Pendidikan dan tingkat penyelesaian sekolah dasar rendah, alasan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat telah menggeser struktur produksi. Namun, mayoritas masyarakat di Pakistan bekerja di sektor pertanian sehingga pergeseran fungsi produksi berdampak buruk terhadap pendapatan masyarakat.

Modal masuk ke suatu wilayah dapat melalui bentuk investasi. Menarik investasi secara tepat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia masyarakat Indonesia melalui peningkatan sumber daya dan kualitas hidup penduduknya. Menurut Juhro et al., (2020) Investasi memiliki dampak yang positif bagi perekonomian secara umum, mulai dari meningkatkan produksi barang/jasa, meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja hingga melancarkan aliran dana yang menganggur sehingga banyak masalah yang diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan BPS, investasi yang masuk ke Indonesia terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan oleh warga negara atau perusahaan asing dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh warga negara atau perusahaan Indonesia. Berikut adalah nilai realisasi PMA di Indonesia

Grafik 1. 2 Realisasi PMA di Indonesia Tahun 2020-2022 (Data Quartal)

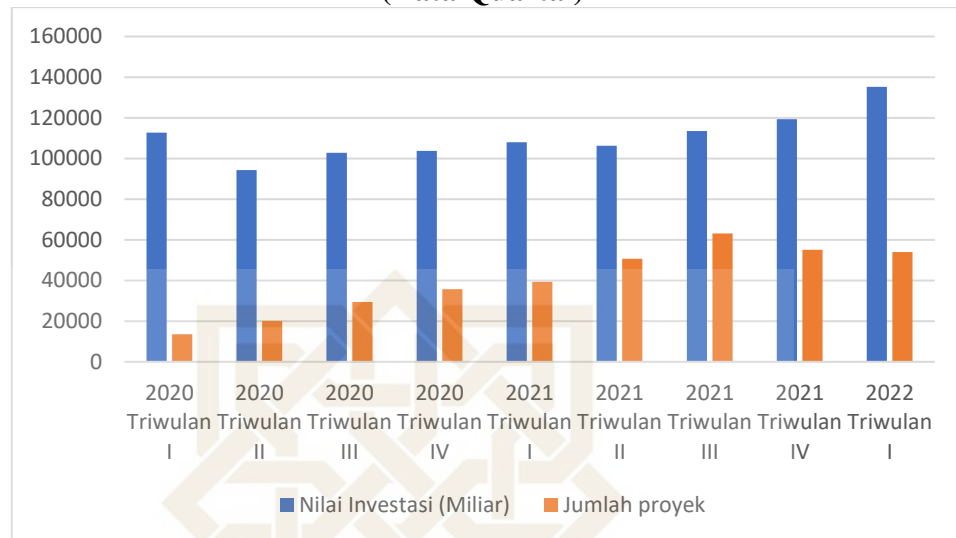


Sumber: BKPM.go.id

Berdasarkan data diatas terlihat ada peningkatan nilai PMA tiap periode. Pada triwulan I 2022 nilai PMA mencapai 10.259 US\$ Juta dengan jumlah proyek 15173 yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Nilai realisasi PMA terbesar di Sulawesi tengah 1319,2 dengan 111 proyek, disusul Jawa Barat 1272,9 dengan 3255, Jakarta 1214,0 dengan 3802 proyek, dan nilai investasi terendah di Sulawesi Barat 0,6 US\$ juta dolar dengan 10 proyek. Sektor yang memiliki nilai PMA paling tinggi adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, disusul industri pertambangan, Listrik, Gas dan Air. Nilai investasi PMA paling rendah pada sektor Kehutanan dan Perikanan.

Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki nilai yang tinggi bahkan kecenderungan yang lebih kuat disaat Covid-19. Berikut tabel realisasi PMDN di Indonesia.

**Grafik 1.3 Realisasi PMDN di Indonesia tahun 2020-2022
(Data Quartal)**



Sumber: BKMP.go.id

Berdasarkan Grafik 1.3 nilai realisasi PMDN sedikit berfluktuatif dan terus meningkat hingga tertinggi pada 2022 Triwulan I sebesar 135181,8 milyar dengan 53926 proyek yang terbagi pada 34 provinsi dengan 23 sektor. Realisasi PMDN terbesar menurut wilayah, tertinggi DKI Jakarta yaitu sebanyak 22942,8 milyar dengan 8983 proyek, disusul Jawa Barat dengan 21226,2 milyar dengan 6980 proyek, Jawa Timur dengan 15389,7 milyar dengan 7,22 proyek dan calon ibukota baru Kalimantan Timur berada pada posisi ke 4 dengan nilai Investasi 10183,7 milyar dengan 2174 proyek. Sedangkan yang paling rendah adalah Gorontalo dengan nilai PMDN 41,2 milyar pad 180 proyek. Alokasi PMDN terbesar pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar 26966,7 milyar dengan 2090 proyek, disusul pertambangan sebesar 18385,6 milyar dengan 965 proyek, dan perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 17467,4 milyar dengan 1399 proyek. Sedangkan nilai investasi terendah pada

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 61,1 milyar dengan 83 proyek dan Perikanan sebesar 140,1 Milyar dengan 268 proyek.

Penelitian yang dilakukan Nisa & Handayani, (2021) Penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sedangkan penanaman modal asing sebaliknya. Selanjutnya pada penelitian Fagbemi & Osinubi, (2020) di Nigeria periode 1981-2018 FDI dalam jangka panjang tidak signifikan sementara signifikan dalam jangka pendek. Selain itu terdapat hubungan asimetris, bukti empiris mengungkapkan bahwa peningkatan arus masuk FDI ke tingkat tertentu dalam jangka Panjang dapat meningkat signifikan pada IPM, hal ini menunjukkan besarnya pengaruh PMA terhadap perekonomian.

Menurut Reiter & Steensma, (2010) PMA memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia ketika kebijakan PMA membatasi investor asing untuk memasuki sektor ekonomi tertentu. Hubungan PMA dan perbaikan dalam pembangunan manusia lebih kuat dan positif ketika korupsi rendah. Hal ini menunjukkan regulasi yang mudah dan pengelolaan keuangan yang masuk ke suatu wilayah dengan tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan investasi.

Pemerintah memiliki andil cukup besar dalam menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya desentralisasi fiskal memberikan daerah kewenangan untuk berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki (Najmuddin & Rizkiyani, 2022). Kebijakan desentralisasi fiskal yang ditetapkan sejak

tahun 2001 mampu mempercepat konvergensi ekonomi antar daerah di Indonesia (Wau & Bachtiar, 2016). Sejalan dengan Sukarti (2012) konstruksi konsepsional Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen dalam peningkatan laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, melalui pemerataan pembangunan dan memperkecil ketimpangan karena luasnya wilayah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah instrumen yang dapat dimasuki kebijakan ekonomi untuk mengatasi resesi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi tertentu pemerintah sering meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur dan mendorong konsumsi guna menggerakkan perekonomian.

Tabel 1. 2 Komponen Penerimaan Pemerintah Daerah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Nilai		Kontribusi (%)	
		Realisasi 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2021	Anggaran 2022
1.	Pendapatan Asli Daerah	166453	187547	46,47	55,63
a	Pajak Daerah	138853	1556654	38,76	46,17
b	Retribusi Daerah	1360	2939	0,38	0,87
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3897	5350	1,09	1,59
d	Lain-lain PAD yang sah	22343	23594	6,27	7
2.	Pendapatan transfer	189279	143892	52,84	42,68
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	189224	143857	52,84	42,68
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55	35	0,02	0,01
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2487	5682	0,69	1,69
Jumlah/Total		358219	337121	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 komponen penerimaan pemerintah daerah paling besar dari transfer pemerintah pusat, yaitu 189224, dengan kontribusinya sebesar 52,84%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi adalah sebesar 166453 berkontribusi 46,47%. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar PAD provinsi dengan total 138853. Jakarta dan Jawa Barat adalah provinsi dengan PAD tertinggi, hal ini didukung dengan banyaknya industri manufaktur yang berada pada kedua wilayah tersebut. Sedangkan PAD terkecil adalah gorontalo. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih memiliki ketergantungan yg tinggi terhadap pemerintah. Dana APBN untuk perimbangan sebesar 30%. Porsi PAD yang lebih kecil terhadap APBD ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Sebagai negara yang memberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebagian besar anggaran dan memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Menurut Mankiw (2007) pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yang fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah tabel realisasi anggaran pengeluaran pemerintah seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021.

Tabel 1. 3 Realisasi dan Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2021

No	Jenis Belanja	Nilai		Kontribusi	
		Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1	Belanja Operasi	244459	229168	69,3	65,31
a.	Belanja Pegawai	84722	94147	24,02	26,83
b.	Belanja Barang dan Jasa	89489	96782	25,37	27,58
c.	Belanja Bunga	219	1165	0,06	0,33
d.	Belanja Subsidi	4451	5741	1,25	1,64
e.	Belanja Hibah	57510	25140	16,3	7,16
f.	Belanja Bantuan Sosial	8067	6194	2,29	1,77
2	Belanja Modal	40491	52402	11,48	14,86
3	Belanja Tidak Terduga	2431	6648	0,69	1,89
4	Belanja Transfer	65355	62700	18,53	17,87
a.	Belanja Bagi Hasil	47396	46574	13,44	13,27
b.	Belanja Bantuan Keuangan	17959	16125	5,09	4,6
Jumlah Total		352736	350918	100	100

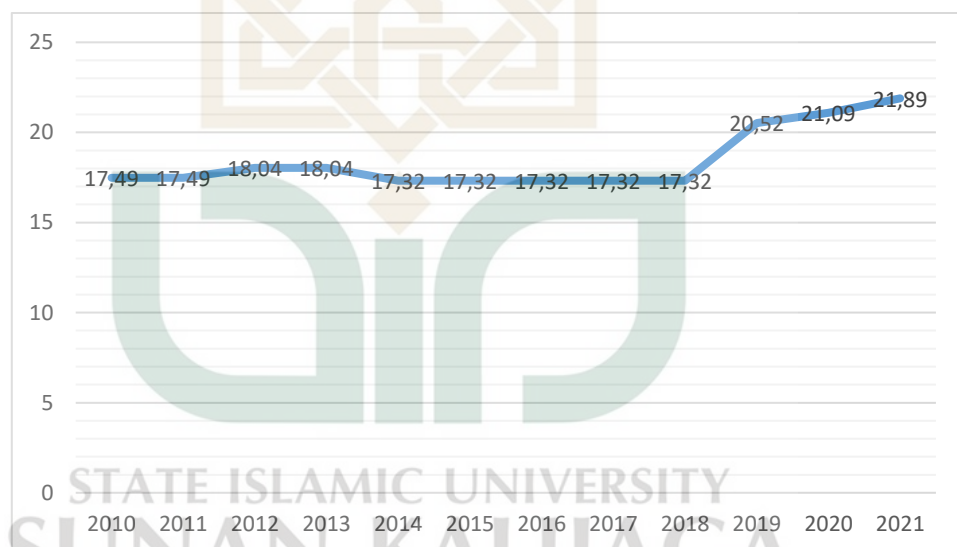
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada umumnya meskipun sebagian besar makro ekonomi memprediksi bahwa kenaikan belanja pemerintah akan memiliki efek ekspansioner pada output. Namun model tersebut seringkali memiliki hasil yang berbeda ketika intervensi kebijakan pemerintah ditekankan pada konsumsi yang tidak produktif (López-salido, 2004)

Untuk membangun masyarakat yang sejahterah perlu diarahkan pada promosi kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga kehidupan yang lebih baik dapat terwujud (Nurwanti et al., 2021). Sejalan dengan UN Women, (2014) pemerataan kesejahteraan manusia akan lebih tercapai terjadi apabila perempuan dilibatkan. Perlu

diingat bahwa diskriminasi gender menjadi fenomena di berbagai negara. Ketidakadilan atau diskriminasi gender bukan hanya tentang tindakan prasangka atau diskriminasi yang dilakukan oleh individu. Hal ini juga berkaitan dengan cara masyarakat yang terstruktur, yang dapat merugikan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan (Kementerian *et al.*, 2012). Namun saat ini, perhatian dunia terhadap pembangunan yang berbasis gender semakin massif, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan perempuan di parlemen.

Grafik 1. 4 Keterlibatan Perempuan Indonesia di Parlemen



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan grafik 1.4 keterlibatan perempuan di parlemen meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 3,2 % dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan partisipasi Indonesia dalam perjuangan kesetaraan gender terus dilakukan. Peningkatan ini baik di lingkup nasional maupun internasional dengan komitmen Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kuota 30% bagi perempuan dalam politik dan publik. Pada

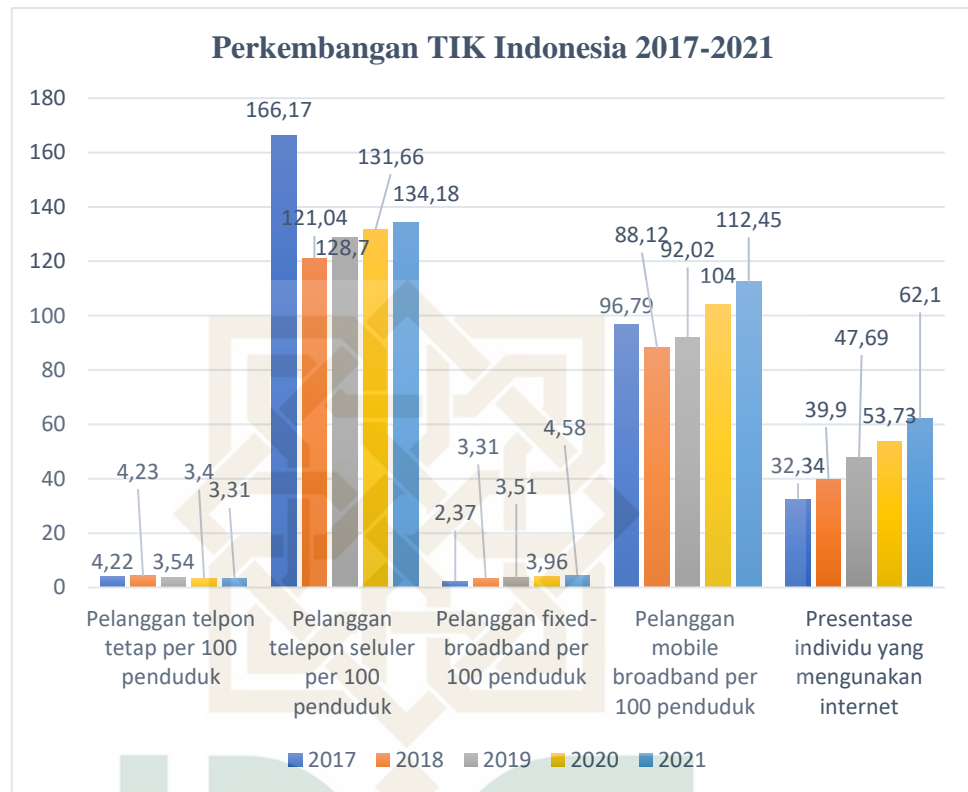
kenyataannya, perempuan masih tertinggal jauh karena rintangan yang disebut 'atap kaca' sebuah idiom yang menggambarkan posisi perempuan dapat melihat posisi yang lebih tinggi tetapi sangat sulit menembusnya (Dzuhayatin, 2020). Penelitian yang dilakukan Alemayehu (2014) di Ethiopia menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah mengklaim partisipasi yang jauh lebih tinggi dalam urusan politik dan ekonomi daripada perempuan yang buta huruf.

Menurut Todaro & Smith (2011) perempuan secara tidak proporsional lebih miskin daripada laki-laki di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diskriminasi di tempat kerja, akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan beban pekerjaan pengasuhan yang tidak dibayar. Perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke layanan kesehatan, pendidikan dan peluang lainnya menjadi penghalang utama bagi pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan. Perempuan juga lebih cenderung bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Sumber daya yang dimiliki perempuan untuk memikul tanggung jawab pengasuhan anak menentukan apakah mereka dapat memutus siklus pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau tidak. Perempuan juga mewariskan nilai-nilai kehidupan. Untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat, keadilan gender harus tercipta.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu instrumen yang penting diperhatikan adalah Teknologi Informasi dan

Komunikasi (*Information Communication and Technology*) atau yang kita kenal dengan ICT. Sejalan dengan Khan et al., (2019), di era modern tidak dapat mengabaikan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada proses pembangunan manusia yang berkelanjutan. TIK berkontribusi pada pembangunan, diantaranya memfasilitasi arus informasi dan data, meningkatkan produktivitas dan efisiensi hingga meningkatkan akses terhadap Informasi dan layanan (Andreas et al., 2016). Selain memudahkan komunikasi, TIK dapat memberikan akses luas ke pendidikan dan pelatihan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Penggunaan TIK oleh perusahaan juga mempromosikan pembangunan sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan fasilitas penghidupan yang giat (Heeks, 2019).

Adaptasi ICT dalam layanan pemerintahan menciptakan *e-government*, yang dapat memberikan layanan kepada warga negara dan bisnis yang lebih efektif dan efisien melalui sarana digital. Pengaplikasian *E-government* merupakan wujud modernitas, inovasi, fleksibilitas untuk penyediaan layanan publik yang efisien dan berkualitas, pada gilirannya akan mendorong seluruh perkembangan masyarakat (Government, 2022). Indonesia sebagai negara kepulauan menyadari sangat pentingnya perkembangan TIK untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang merata. Namun bagaimana implementasinya pada masyarakat? Berikut adalah grafik Perkembangan TIK di Indonesia

Grafik 1. 5 Perkembangan TIK Indonesia 2017-2021

Sumber: BPS dan Kominfo

Berdasarkan Grafik 1.5 secara umum terdapat tren positif pada indikator penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia kecuali indikator pelanggan telepon tetap yang terus menurun sejak tahun 2019. Meningkatnya pengguna internet tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia karena adanya Covid-19. Pandemi melemahkan perekonomian seluruh negara dan membuat berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, keuangan hingga pertambangan juga mengalami kemerosotan. Pada titik ini setiap negara mencari celah dari sumber kegiatan ekonomi produktif agar bisa bangkit dari guncangan ini (Afin & Ardiansyah, 2021). Di lain sisi perkembangan TIK melesat naik dalam merespon pandemi.

Adopsi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai lini menjadi solusi dan terbukti berhasil menggerakkan kembali aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan Iqbal et al. (2019), dimana pertumbuhan ekonomi dunia modern perlu mendapatkan perhatian terutama melalui inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi. Caranya dengan menempatkan teknologi dan pengetahuan sebagai inti dari isu kebijakan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, dalam penelitian ini menggunakan *ICT Development Index* sebagai proyeksinya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal isu pengangguran, kemiskinan, dan populasi yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama masa tersebut, tingkat pengangguran masih menjadi masalah utama, terutama di kalangan pemuda. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah 6,49 persen atau sebesar 9,10 juta penduduk.

Pengangguran yang tinggi memiliki dampak langsung pada tingkat kemiskinan yang sulit diredam, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang. Kesenjangan antara pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terus menjadi tantangan, menghambat mobilitas sosial dan perkembangan manusia yang merata. Pada saat yang sama, pertumbuhan populasi yang berkelanjutan juga memberikan tekanan tambahan pada sumber daya alam dan infrastruktur sosial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji dan mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan. Perbedaan dan kontribusi penelitian ini terletak pada 1.) peneliti berusaha melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat indonesia direpresentasikan dengan lebih banyak variabel untuk mengurangi bias 2.) Peneliti memasukkan variabel pemberdayaan gender dan *ICT Development Index*, kedua indikator tersebut masih baru sehingga masih jarang digunakan 3.) Menggunakan 3 variabel kontrol pada penelitian untuk menjaga keakuratan dan ketepatan interpretasi hasil penelitian 4.) Menggunakan data 34 provinsi sehingga diharapkan mampu merepresentasikan kesejahteraan di Indonesia secara umum secara komprehensif. Judul yang diajukan pada penelitian ini adalah **“Partisipasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Gender dan *ICT Development Index* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti di dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana PMA berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana PMDN berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021?

3. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021?
4. Bagaimana Pemberdayaan gender berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021?
5. Bagaimana *ICT Development Index* berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh PMA terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021
2. Menganalisis pengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021
3. Menganalisis pengaruh PPD terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021
4. Menganalisis pengaruh pemberdayaan gender terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021
5. Menganalisis pengaruh *ICT Development Index* terhadap kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat secara umum mulai dari akademisi sampai praktisi.
- b. Menjadi bahan referensi atau rujukan untuk mahasiswa nantinya dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan dan kesejahteraan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memuat paparan secara ringkas mengenai isi dari tiap-tiap bab dalam tesis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum penelitian, latar belakang masalah, ringkasan dari penelitian terdahulu, ringkasan dari objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan landasan teori dari variabel yang dijadikan penelitian, menyampaikan penelitian terdahulu, literatur review terkait, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, deskripsi dan pemilihan data, teknik pemilihan data dan sumber, definisi operasional variabel, dan model analisis data.

BAB IV: Menjelaskan gambaran umum objek penelitian, menjelaskan hasil dari penelitian yaitu uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB V: Kesimpulan yang menjelaskan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan dan Rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak dengan berbagai pendekatan. Pada penelitian ini telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia dengan hasil sebagai berikut;

1. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 99,50%.
2. Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan PMA yang masuk ke Indonesia sebagian besar masuk pada sektor padat modal tidak padat karya sehingga meningkatkan ketimpangan dan tidak meningkatkan pendapat masyarakat. Modal dan keuntungan yang didapat melalui PMA akan kembali pada investor di luar negeri. Selain itu tingginya nilai PMA yang masuk menyebabkan kita tidak bisa menghindari krisis lingkungan, yang mempengaruhi kesejahteraan. Pemerintah perlu memperhatikan peraturan terkait PMA sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
3. Variabel PMDN berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia merepresentasikan iklim positif bagi masa depan pembangunan Indonesia. Pembangunan yang didanai oleh investasi

dalam negeri memberikan *multiplier effect* lebih besar bagi perekonomian dan pembangunan manusia. Sektor yang dituju adalah sektor padat karya sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Minat masyarakat untuk menyimpan dananya di dalam negeri harus didukung dengan meningkatkan pengelolaan yang efektif dan profesional sehingga kepercayaan masyarakat terus terjaga dan dana yang ada tetap berputar di dalam negeri.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini menunjukkan citra positif pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fiskal. Pemerintah daerah perlu terus melakukan penyesuaian anggaran agar aplikasinya tepat sasaran. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan pendapatan aslinya dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat untuk membiayai belanjanya.
5. Variabel Pemberdayaan Gender tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan pemberdayaan perempuan di Indonesia belum memiliki dampak yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya masih terdapat ketimpangan upah pada level pekerjaan yang sama.
6. Variabel *ICT-Development Index* berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Kemajuan Teknologi komunikasi dan Informasi berkontribusi pada peningkatan kualitas masyarakat baik pada pendidikan, kesehatan hingga ekonomi sehingga meningkatkan

kesejahteraan. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan pemerataan ICT Development index di seluruh wilayah.

7. Persentase Pengangguran Terbuka dan populasi tidak berdampak terhadap IPM. Persentase Penduduk Miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi diperlukan strategi yang realistis agar tidak menjadi masalah serius di kemudian hari
8. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat agar hidup dengan layak dan bermartabat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Begitu juga masyarakat harus memiliki kesadaran diri untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan *maqosid syariah*.

B. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini bersifat umum sehingga diperlukan penelitian yang mengkaji lebih detail. Selain itu pada tahun penelitian ini terjadi pandemi covid-19 dimana kemungkinan terjadi shock data. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan pengkajian untuk menguji keakuratan hasil. Selain itu peneliti dapat menambahkan variabel lain untuk mengurangi bias dan hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheampong, A. O., Opoku, E. E. O., Dzator, J., & Kufuor, N. K. (2022). Enhancing Human Development In Developing Regions: Do ICT And Transport Infrastructure Matter? *Technological Forecasting And Social Change*, 180 (May), 121725. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121725>
- Afin, R., & Ardiansyah, K. Y. (2021). *COVID 19 , Information And Communication Technology (ICT), And Digital Banking Effect On Entrepreneur Performance : Evidence From Indonesia Household Survey*. 1–21.
- Alemayehu, B. (2014). The Impact Of Education On Rural Womens Participation In Political And Economic Activities. *International Journal Of Educational Administration And Policy Studies*, 6(2), 23–31. <https://doi.org/10.5897/Ijeaps2013.0316>
- Anan, E. (2022). *Desentralisasi Fiskal Lahan Subur Praktik Korupsi Di Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Andreas, S., Sameer, K., & Olivier, S. (2016). *Road To 2030 : Information And Communications Technology In ADB ' S Corporate Strategy And Operations*. July, 66.
- Angel, M., Mohamed-Maslouhi, M., & Angel, M. (2021). *Technology In Society The Digital Divide And Its Impact On The Development Of Mediterranean Countries*. 64(August 2020). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101452>
- Angelia, Febri, Y. M. . G. (2020). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Di Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(2), 1–27. <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol15/iss2/4>
- Arif, M. N. R. Al. (2014). *Ekonomi Islam*. Universitas Terbuka.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan* (5th Ed.). UPP STIM YKPN.
- Batlagi, B. H. (2005). *Econometrics Analysisi Of Data Panel* (Third Edit).
- Beauvoir, S. De. (2016). *Second Sex Kehidupan Perempuan*. Narasi.

- Fagbemi, F., & Osinubi, T. T. (2020). Leveraging Foreign Direct Investment For Sustainability: An Approach To Sustainable Human Development In Nigeria. *Resources, Environment And Sustainability*, 2(September), 100005. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2020.100005>
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Fauziyyah, S. (2021). *Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020*. Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang.
- Feriyanto, N. (2016). The Effect Of Employment, Economic Growth, And Investment On HDI: In Provinces In Indonesia. *Journal Of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i1.537>
- Ferraz, D., Moralles, H. F., Campoli, J. S., De Oliveira, F. C. R., & Rebelatto, D. A. Do N. (2018). Economic Complexity And Human Development: DEA Performance Measurement In Asia And Latin America. *Gestao E Producao*, 25(4), 839–853. <https://doi.org/10.1590/0104-530X3925-18>
- Goswami, T., & Ghosal, S. (2022). Domestic Water Poverty In A Semi-Arid District Of Eastern India: Multiple Dimensions, Regional Pattern, And Association With Human Development. *Environmental Development*, Volume(44100742). <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2022.100742>
- Government, D. (2022). *E-Government Survey 2022 E-GOVERNMENT SURVEY 2022*.
- Gujarati, D., & Zain, S. (2005). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Harun, I. (N.D.). *Studi Efektivitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Tambang Batubara Terbuka : Studi Kasus : SISPAL SP-20 PT Adaro Indonesia Di Kab* . <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109752.pdf>
- Heeks, R. (2019). *Development Informatics Working Paper Series* (Issue July). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26013.87522>
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Deepublish.

- Iqbal, K., Hassan, S. T., Peng, H., & Khurshaid. (2019). Analyzing The Role Of Information And Telecommunication Technology In Human Development: Panel Data Analysis. *Environmental Science And Pollution Research*, 26(15), 15153–15161. <https://doi.org/10.1007/S11356-019-04918-4>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2020). *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kementerian, K., Perempuan, P., Perlindungan, D., Dengan Badan, A., & Statistik, P. (2012). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012*.
- Kementrian Keuangan RI. (2016). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Khan, N. H., Ju, Y., & Hassan, S. T. (2019). Investigating The Determinants Of Human Development Index In Pakistan: An Empirical Analysis. *Environmental Science And Pollution Research*, 26(19), 19294–19304. <https://doi.org/10.1007/S11356-019-05271-2>
- Korle, K., Amoah, A., & Hughes, G. (2020). *Investigating The Role Of Disaggregated Economic Freedom Measures And FDI On Human Development In Africa*. 36(4), 303–321. <https://doi.org/10.1108/JEAS-02-2019-0017>
- Kristiawan, A. S. (2020). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, ICT Development Index Dan Good Governance Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Anggota ASEAN Dan SAARC Kategori Lower-Upper Medium. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 140–156. <https://doi.org/10.14710/Jdep.3.2.140-156>
- Kuranto, A. J., Arif, M., Harapan, A., Perempuan, H., Perempuan, R. L. S., Perempuan, H., & Sekolah, R. L. (2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. 10(1), 207–216.
- Loeis, A. A., & Setiawina, N. D. (2020). Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten / Kota Provinsi Bali Periode 2010-2020 Ardian Akmal Loeis Nyoman Djinar Setiawina Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Pembangunan Manusia Adalah S. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 495–506.

- López-Salido, J. D. (2004). *Working Paper Series No . 3 3 9 / April 2004 Forum On Monetary Policy Understanding The Effects Of Government Spending On By Jordi Galí , Wo R K I N G Pa P E R S E R I E S Forum On Monetary Policy Understanding The Effects Of Government Spending On.*
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi Edisi Ke 6.* Erlangga.
- Meliani, A. M., Widodo, S., & Hariani, E. (2021). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (Pma), Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 526–535. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18153>
- Miles, M. (1998). *Patriarchy & Accumulation On A World Scale.* Zed Books.
- Mill, J. S. (2009). *Principles Of Political Economy.*
- Musa, A. Y. M. Bin. (N.D.). *Tafsir Al Qur;An Hidayatul Insan* (Jilid 2).
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan.* Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Najmuddin, Z., & Rizkiyani, A. (2022). *Government Spending By Function And Economic Growth In Maluku Utara : I-O Table And Panel Data Regression Analysis.* VI(1), 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.254>
- Nam, H.-J., & Ryu, D. (2023). FDI And Human Development: The Role Of Governance, ODA, And National Competitiveness. *Journal Of International Financial Markets, Institutions And Money*, 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101769>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2017). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam.* Kencana Prenada Media Group.
- Nisa, A. N. A., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2012-2018. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(1), 1–13.
- Noor, H. F. (2005). *Manajemen Investasi Dan Keuangan.* STIA LAN Press.

- Nurwanti, S. E., Kadarwati, N., Eltayeb, K., & Adam, E. (2021). *The Effect Of Government Expenditure And Economic Growth On Gender Development Index In Special Region Of Yogyakarta Province*. 16(2), 74–83.
- Organization, I. L., & Women, U. (2020). *Kesenjangan Upah Berbasis Gender Di Indonesia Statistik : Kesenjangan Upah Berbasis Gender Di Indonesia*. September, 2020.
- Osakede, U. A. (2018). *Infrastructure And Health System Performance In Africa*. 20(4), 375–400.
- Osakede, U. A., Aramide, V. O., & Adesipo, A. E. (2023). Research In Globalization Correlates Of Human Development In Africa : Evidence Across Gender And Income Group. *Research In Globalization*, 6(December 2022), 100135. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100135>
- PIĘTAK, Ł. (2014). Review Of Theories And Models Of Economic Growth. *Comparative Economic Research*, 17, Number. <https://doi.org/10.2478/Cer-2014-0003>
- Prasasti, D. (2006). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional Dan Konvergensi. *Journal Of Indonesian Economy And Business*, 21(4), 344–360.
- Qoyum, A. (2018). *Maqasid Ash-Shari ' Ah Framework And The Development Of Islamic Finance Products : The Case Of Indonesia*. 12(2), 169–188.
- Reiter, S. L., & Steensma, H. K. (2010). Human Development And Foreign Direct Investment In Developing Countries: The Influence Of FDI Policy And Corruption. *World Development*, 38(12), 1678–1691. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.04.005>
- Report, I., Dutta, S., & Lanvin, B. (2014). *The Global Information Technology Report 2014 Rewards And Risks Of Big Data*.
- Sari, I. F. (2022). *Measuring The Contribution Of Investment , Export , And Internet Usage On Welfare : Indonesian Case Study*. 9(2), 575–584.
- Sastriyani, S. H. (Ed.). (2009). *Gender And Politics*. Tiara Wacana.
- Shiva, V. (1997). *Bebas Dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi Dan Perjuangan Hidup Di India*. Yayasan Obor Indonesia.

- Smoke, P. (2001). *Fiscal Decentralization In Developing Countries A Review Of Current. 2.*
- Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. (2017). Analisis Pengaruh Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Journal Of Economics Research ...*, 1, 40–52.
- Sugiono. (2001). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sukarti, A. (2012). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *MIMBAR*, XXVIII, No, 39–46.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Modern*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sunengsih, I. G. N. M. J. N. (2009). Kajian Analisis Regresi Dengan Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 51–58.
- Syahrur, & Salim. (2012). *Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif.Pdf*. Ciptapustaka Media.
- Tandelilin, E. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. *Manajemen Investasi*, 1–34.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011a). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Kesebelas)*. Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011b). *Pertumbuhan Ekonomi* (A. Maulana (Ed.); Kesebelas). Erlangga.
- UN Women. (2014). World Survey On The Role Of Women In Development 2014: Gender Equality And Sustainable Development. In *UN Women*.
- Vargas-Montoya, L., Gimenez, G., & Fern, M. (2023). *Socio-Economic Planning Sciences ICT Use For Learning And Students ' Outcomes : Does The Country ' S Development Level Matter ?* 87(February). <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101550>
- Wang, Z., Danish, Zhang, B., & Wang, B. (2018). Renewable Energy Consumption, Economic Growth And Human Development Index In Pakistan: Evidence Form Simultaneous Equation Model. In *Journal Of*

Cleaner Production (Vol. 184). Elsevier Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.260>

Wau, T., & Bachtiar, N. (2016). LABOR MOBILITY , FISCAL DECENTRALIZATION , AND. *International Journal Of Management And Applied Science*, Volume-2(8), 123–128.

Wibowo, M. G. (2016). *Kebijakan Pembangunan Nasional : Pendahuluan Pada Awal Februari 2016 Ini , Pemerintah Negara Uni Emirat Baru , Yaitu Kementerian Kebahagiaan (Minister Of State For Happiness) Dan Kementerian Toleransi (Minister Of State For Tolerance)*. *Kementerian Ini*. 50(1).

Wijaya, I., & Adityawarman. (2015). Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), 1–11.